

RINGKASAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

I. PENDAHULUAN

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2019 yang merupakan sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disepakati secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan DPRD Kabupaten Madiun.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan Pemilukada dan telah dilaksanakan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Madiun pada tanggal 25 Juli 2018, telah berakhirnya masa jabatan Bupati periode 2013 – 2018 pada tanggal 3 Agustus 2018, serta pembahasan KUA PPAS Tahun 2019 tanggal 16 Juli 2018 menyepakati bahwa Dokumen Rancangan KUA sudah disinkronkan dengan visi misi Bupati terpilih, maka dokumen KUA Tahun 2019 ini telah mengalami perbaikan, sebagaimana hasil sinkronisasi dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018 – 2023.

II. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Indikator Makro Ekonomi di Kabupaten Madiun tahun 2016 dan 2017 dapat dijabarkan sebagaimana tabel tersebut di bawah ini :

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun 2016 s.d 2017

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	
			2016	2017*
1	PDRB (ADH Berlaku)	Rp.Juta	15.226.966,67	16.230.315,42
2	PDRB (ADH Konstan)	Rp.Juta	11.268.897,88	11.762.231,70
3	Inflasi	(%)	5,83	5,32

4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	5,27	5,39
5	Pendapatan Perkapita	Rp.Ribu	22.841,2	25.311

PDRB ADHB Kabupaten Madiun menunjukkan total output perekonomian secara nominal sebelum dikoreksi oleh tingkat inflasi ditahun yang sama menunjukkan capaian sebesar Rp.15.226.966.670.000,- di tahun 2016 dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi Rp.16.230.315.420.000,- di tahun 2017. Sedangkan PDRB ADHK yang menunjukkan total nilai output perekonomian secara riil tahun 2016 memiliki capaian sebesar Rp.11.268.897.880.000,- dan meningkat menjadi Rp.11.762.231.700.000,- di tahun 2017.

Sedangkan untuk Indikator Makro Ekonomi pada tahun 2018 dan 2019 ditargetkan sebagaimana tabel tersebut di bawah ini :

Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2018 & 2019

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	
			2018*)	2019**)
1	PDRB (ADH Berlaku)	Rp.Juta	17,417,396.56	18.604.477,37
2	PDRB (ADH Konstan)	Rp.Juta	12,286,297.85	12.810.363,99
3	Inflasi (IHK)	(%)	4,33	4,01
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	5,26	5,37
5	Pendapatan Perkapita	Rp.Ribu		

Sentimen dari faktor eksternal maupun internal sebagai dampak perpindahan pusat pemerintahan menjadi pemicu berkembangnya sektor konstruksi, real estate serta jasa. Sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diperkirakan bisa mencapai level 5,26 persen, mengingat peranan sektor ekonomi yang dominan seperti perdagangan, konstruksi, industri serta jasa akan mampu meningkatkan elastisitas penciptaan lapangan pekerjaan, indikasi ini dapat dilihat dari banyaknya angkatan kerja pada kelompok usia 20 sampai dengan 34 tahun yang terserap pada lapangan kerja pada sektor tersebut. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Madiun perlu menarik investasi dari luar untuk mengembangkan sektor penghasil barang (*tradables*) yang tertinggal dalam proses

percepatan pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir, mengingat pertumbuhan sektor tersebut sangat cepat sehingga dapat sebagai daya ungkit menunjang peningkatan PAD.

III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R-APBD) TAHUN 2019

Dalam rangka mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi Kabupaten Madiun, maka sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan sekitar 5,37%;
- b. Tingkat pengangguran terbuka / TPT sebesar 2,95%;
- c. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,62 %;
- d. Laju inflasi diperkirakan sekitar 4,01%.

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RKPD Tahun 2019, yang mana kondisi Kabupaten Madiun belum memiliki RPJMD dengan Visi Misi Bupati terpilih 2018 – 2019, maka penekanan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 didasarkan pada issue strategis Kabupaten Madiun yang disinkronkan dengan prioritas Pusat, prioritas Provisi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Paket Prioritas 1

RKP 2019	: Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.
RKPD Jatim 2019	: Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan.
RKPD Kab Madiun 2019	: IS 3 : Penguatan struktur ekonomi melalui revitalisasi sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa ;
	IS 4 : Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya ;
	IS 8 : Penguatan desa mandiri melalui optimalisasi pengolahan potensi lokal ;
	IS 11 : Pengembangan kepemudaan, seni dan olah raga.

Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Paket Prioritas di atas, antara lain:

1. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan serta usaha jasa peralatan berbasis pertanian terpadu
2. Peningkatan kemitraan Usaha Mikro dalam rangka penguatan kemampuan managerial, teknologi, permodalan dan pemasaran
3. Peningkatan kualitas dan Pemberdayaan Koperasi
4. Peningkatan daya tarik industri kreatif berbasis sumberdaya lokal daerah
5. Peningkatan Perluasan jaringan pasar dan promosi produksi daerah
6. Peningkatan jaminan kepastian hukum bagi investor
7. Pengembangan destinasi pariwisata unggulan
8. Peningkatan kelembagaan pariwisata
9. Peningkatan pemasaran dan industri pariwisata
10. Pengembangan seni budaya

Paket Prioritas 2

RKP 2019	: Pemantapan Ketahanan Energi, pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan.
RKPD Jatim 2019	: Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air dan pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup yang berkelanjutan
RKPD Kab Madiun 2019	: IS 7 : Pengelolaan lingkungan yang sinergi dengan kebijakan tata ruang berbasis pembangunan berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Paket Prioritas di atas, antara lain:

1. Pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan
2. Meningkatkan daya dukung kawasan lindung
3. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
4. Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Program Pengembangan Tanaman Pangan.

Paket Prioritas 3

RKP 2019	: Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
RKPD Jatim 2019	: Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan.
RKPD Kab Madiun 2019	: IS 1 : Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran ;
	IS 2 : Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan
	IS 6 : Tatakelola Pemerintah Daerah yang inovatif dan handal guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata.
	IS 10 : Penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;

Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Paket Prioritas di atas, antara lain:

1. Pengembangan metode pembelajaran yang inovatif
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
3. Penanganan Fakir miskin dan penyandang masalah sosial
4. Penguatan pengarusutamaan gender
5. Pengembangan perumahan layak huni
6. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Peningkatan public services
8. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Paket Prioritas 4

RKP 2019	: Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
RKPD Jatim 2019	: Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan.
RKPD Kab Madiun 2019	: IS 5 : Pemenuhan terhadap kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata.

Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Paket Prioritas di atas, antara lain:

1. Penanganan wilayah kumuh dengan pemberdayaan komunitas perumahan
2. Penanganan dan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan
3. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
4. Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah, air bersih dan penanganan sampah

Paket Prioritas 5

RKP 2019	: Stabilitas keamanan Nasional dan kesuksesan pemilu.
RKPD Jatim 2019	: Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu
RKPD Kab Madiun 2019	: IS 9 : Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya lokal

Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Paket Prioritas di atas, antara lain:

1. Optimalisasi Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
4. Penegakan Produk Hukum Daerah
5. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
6. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan kehidupan Beragama

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2019.

Target Pendapatan Daerah R-APBD Tahun Anggaran 2019

NO.	U R A I A N	APBD TA 2018	R APBD TA 2019	%
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	1.788.177.228.001,00	2.140.068.601.414,00	19,68
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	185.513.458.691,00	193.033.329.329,00	4,05
	a. Hasil Pajak Daerah	51.243.461.000,00	58.664.987.900,00	14,48
	b. Hasil Retribusi Daerah	32.531.528.200,00	10.369.218.480,00	(68,13)
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.791.034.441,00	4.025.797.079,00	(30,48)
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	95.947.435.050,00	119.973.325.870,00	25,04
2	Dana Perimbangan	1.276.829.781.650,00	1.626.022.684.425,00	27,35
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	78.658.491.650,00	79.442.608.650,00	1,00
	b. Dana Alokasi Umum	877.868.685.000,00	877.868.685.000,00	0,00
	c. Dana Alokasi Khusus	320.302.605.000,00	668.711.390.775,00	108,77
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	325.833.987.660,00	321.012.587.660,00	(1,48)
	a. Pendapatan Hibah	57.215.400.000,00	52.394.000.000,00	(8,43)
	b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	103.432.422.660,00	103.432.422.660,00	0,00
	c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	160.881.185.000,00	160.881.185.000,00	0,00
	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.304.980.000,00	4.304.980.000,00	0,00

Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019, target Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2019 sebesar Rp. 2.140.068.601.414,00 mengalami kenaikan sebesar 19,68 % jika dibandingkan dengan tahun 2018, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 dibanding tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,05 %. Kenaikan tersebut diperoleh dari :

- 1) Pajak Daerah naik sebesar 14,48% karena adanya peningkatan dari pajak hiburan dan pajak penerangan jalan;
- 2) Retribusi Daerah turun sebesar 68,13% karena mulai tahun 2019 RSUD Dolopo berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pendapatannya berubah rekening, berpindah menjadi rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun sebesar 30,48% karena bagi laba atas penyertaan modal BPR turun sebesar 7,78% serta Pendapatan PDAM yang belum dimasukkan karena belum ada kejelasan anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Madiun mengingat anggaran dimaksud berasal dari hibah pemerintah Pusat.
- 4) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar 25,04%.

b. Dana Perimbangan diasumsikan naik 27,35% karena dengan adanya kenaikan usulan Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2019 yaitu naik signifikan sebesar Rp 348.408.785.775 atau naik sebesar 108,77%.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah turun sebesar 1,48% dikarenakan adanya penurunan Pendapatan Hibah sebesar 8,43%. Diasumsikan Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya masih sama dengan Pendapatan Tahun Anggaran 2018.

Arah kebijakan belanja Kabupaten Madiun, pada prinsipnya digunakan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Total rencana belanja daerah pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 2.136.590.721.487,00 dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.120.630.766.414,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 1.015.959.955.073,00. Kebijakan belanja daerah sampai dengan 2019 didominasi oleh Belanja Tidak Langsung sekitar

52,45% dari total belanja daerah, sedangkan untuk Belanja Langsung akan menyerap kurang lebih 47,55%.

**Pagu Indikatif untuk Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019**

NO.	U R A I A N	APBD TA. 2018 (Rp)	APBD TA. 2019 (Rp)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA	1.812.000.389.361,00	2.136.590.721.487,00	17,91
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.103.581.398.755,00	1.120.630.766.414,00	1,54
	a. Belanja Pegawai	748.240.102.555,00	810.664.531.714,00	8,34
	b. Belanja Subsidi	515.000.000,00	515.000.000,00	0,00
	c. Belanja Hibah	66.106.274.360,00	14.592.867.500,00	(77,93)
	d. Belanja Bantuan Sosial	3.958.500.000,00	14.430.500.000,00	264,54
	e. Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi / Kab. / Kota dan Pem. Desa	4.927.282.000,00	5.001.781.360,00	1,51
	f. Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi / Kab. / Kota dan Pem. Desa	277.834.239.840,00	274.426.085.840,00	(1,23)
	g. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(50,00)
	BELANJA LANGSUNG	708.418.990.606,00	1.015.959.955.073,00	43,41
	a. Belanja Pegawai	26.381.870.100,00	11.367.200.000,00	(56,91)
	b. Belanja Barang dan Jasa	384.877.267.704,00	425.547.317.493,00	10,57
	c. Belanja Modal	297.159.852.802,00	579.045.437.580,00	94,86

Secara umum maka kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada R-APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2019

NO.	U R A I A N	R APBD 2019
1	2	3
I	PENDAPATAN	2.140.068.601.414,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	193.033.329.329,00
2	DANA PERIMBANGAN	1.626.022.684.425,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	321.012.587.660,00
II	BELANJA	2.136.590.721.487,00
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.120.630.766.414,00
2	BELANJA LANGSUNG	1.015.959.955.073,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.477.879.927,00
III	PEMBIAYAAN DAERAH	
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.522.120.073,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(3.477.879.927,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00